



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERI PURWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN**
3. NHK : **121920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.968.603.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 838.811.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 664.278.000
3. Tanah Seluas 339 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 314.913.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 518.090.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 265.711.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 297.670.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.442.130.000
8. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.627.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **965.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HRV - Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER TRD Tahun 2020, HASIL SENDIRI



Rp. 300.000.000

4. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 139.819.710**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 103.700.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 8.177.122.710**III. HUTANG** Rp. 980.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 7.197.122.710

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.